

COMMUNICATIONS

STRATEGI PENYALURAN ASPIRASI PUBLIK OLEH PARLEMEN PEREMPUAN THAILAND CHITPAS TANT KRIDAKORN: ANALISIS POLA KOMUNIKASI POLITIK

^{1*}Darra Ananda, ²Raden Ayu Marizka A.

1. Department of Communication Sciences, Lampung University, Lampung, Indonesia.
2. Department of Communication Sciences, LSPR Institute of Communication and Business, Jakarta, Indonesia.

[*darrannda14@gmail.com](mailto:darrannda14@gmail.com)

ARTICLE INFO

Received on November 15, 2025
Received in revised form January 7, 2025
Accepted on January 8, 2025
Published on January 31, 2025

Keywords: (3-5 words)

Political Communication, Women Parliamentarians, Gender Representation, Persuasive Rhetoric

How to cite this article: Ananda, Darra & Raden Ayu Marizka A. (2025). *Strategi Penyaluran Aspirasi Publik oleh Parlemen Perempuan Thailand Chitpas Tant Kridakorn: Analisis Pola Komunikasi Politik*. *Communications* 7(1), 74-103

ABSTRACT

This study aims to analyze the pattern of political communication in the absorption and channeling of public aspirations by female parliamentarians in Thailand, focusing on Chitpas Tant Kridakorn. The method used in this study is qualitative, with an in-depth interview approach and literature study. This study examines how Chitpas, as a female parliamentarian, uses political communication strategies and persuasive rhetoric to voice and fight for the aspirations of the community, especially on social issues

involving children, education, and vulnerable groups. The research findings show that Chitpas has succeeded in building credibility and public trust through the use of ethos, pathos, and logos in her rhetoric. She also shows strong empathy for the needs of the community, especially in addressing issues related to children's welfare and access to education. In the process of absorbing aspirations, Chitpas applies a collaborative approach with various parties to ensure that the resulting policies are inclusive and responsive to the needs of the community. In addition, the concept of gender representation is manifested in Chitpas' leadership which shows the important role of women in fighting for social issues at the parliamentary level. This research emphasizes the importance of women's roles in politics, as well as how appropriate communication strategies can be used to strengthen representation and diversity in public decision-making.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola komunikasi politik dalam penyerapan

dan penyaluran aspirasi publik oleh parlemen perempuan di Thailand, dengan fokus pada Chitpas Tant Kridakorn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan wawancara mendalam dan studi pustaka. Penelitian ini mengkaji bagaimana Chitpas, sebagai seorang anggota parlemen perempuan, menggunakan strategi komunikasi politik dan retorika persuasif untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama dalam isu-isu sosial yang melibatkan anak-anak, pendidikan, dan kelompok masyarakat rentan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Chitpas berhasil membangun kredibilitas dan kepercayaan publik melalui penggunaan ethos, pathos, dan logos dalam retorikanya. Ia juga menunjukkan empati yang kuat

terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan anak-anak dan akses pendidikan. Dalam proses penyerapan aspirasi, Chitpas menerapkan pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, konsep representasi gender terwujud dalam kepemimpinan Chitpas yang menunjukkan peran penting perempuan dalam memperjuangkan isu-isu sosial di tingkat parlemen. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran perempuan dalam politik, serta bagaimana strategi komunikasi yang tepat dapat digunakan untuk memperkuat representasi dan keberagaman dalam pengambilan keputusan publik.

INTRODUCTION

Komunikasi politik yang efektif merupakan komponen penting keberhasilan politik dalam masyarakat demokratis. Komunikasi Politik mencakup berbagai strategi, saluran, dan teknik penyampaian pesan yang digunakan oleh politisi dan partai untuk menyampaikan gagasan mereka, membangun dukungan, dan mengamankan kemenangan pemilu (Bennett, 2018). Dalam konteks demokrasi modern, parlemen memainkan peran sentral dalam menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Parlemen berfungsi sebagai wadah penyaluran aspirasi rakyat dan sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan publik. Di Thailand, khususnya dalam lembaga parlemen yang diisi oleh perempuan, muncul dinamika baru dalam komunikasi politik yang memperlihatkan pola-pola unik dalam penyerapan dan penyaluran aspirasi publik.

UN Women di Thailand telah berupaya memastikan lingkungan yang mendukung bagi perempuan dari segala usia untuk berpartisipasi penuh, memimpin, dan terlibat dalam lembaga serta proses politik (UN Women, 2018). Salah satu indikator yang penting partisipasi politik perempuan adalah persentase keterwakilan mereka dalam badan legislatif nasional dan pemerintah daerah. Perempuan dan anak perempuan memiliki kebutuhan serta prioritas yang berbeda dalam layanan publik. Melalui dialog lintas sektor, UN Women telah mengidentifikasi solusi bersama untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan

politik perempuan di Thailand, memperkuat kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan politik baik di tingkat nasional maupun daerah (UN Women, 2018).

Di Thailand, khususnya dalam lembaga parlemen yang diisi oleh perempuan, muncul dinamika baru dalam komunikasi politik yang memperlihatkan pola-pola unik dalam penyerapan dan penyaluran aspirasi publik. Salah satu figur penting yang menjadi representasi keterlibatan perempuan dalam politik Thailand adalah Chitpas Tant Kridakorn, anggota parlemen perempuan yang memiliki perjalanan karier politik dan pengalaman unik dalam konteks sosial-politik Thailand. Chitpas Tant Kridakorn lahir pada 16 Juni 1985 di Bangkok, Thailand. Ia merupakan lulusan King's College London dengan gelar sarjana geografi, serta mendapatkan gelar master administrasi publik dari Chulalongkorn University, di mana ia dinobatkan sebagai lulusan terbaik. Ia memulai karier politiknya di usia 23 tahun dengan bergabung dalam Partai Demokrat Thailand. Selama karier politiknya, ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Thailand (2019–2023) dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Demokrat Thailand.

Sebagai salah satu pemimpin protes anti-pemerintah pada 2013–2014, Chitpas menghadapi berbagai tantangan, termasuk stigma terhadap peran perempuan dalam politik yang seringkali masih dianggap subordinat. Kendati demikian, ia berhasil menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Selain itu, latar belakang keluarga yang terhubung dengan kerajaan Thailand serta pengalamannya sebagai perempuan di dunia politik yang didominasi laki-laki menjadikannya subjek yang menarik untuk diteliti.

Menurut data dari Inter-Parliamentary Union (2023) partisipasi politik perempuan di parlemen Thailand pada tahun 2024, mencapai sekitar 19,40% (Inter-Parliamentary Union, 2023). Parlemen nasional memainkan peran penting dalam menetapkan arah kebijakan dan alokasi anggaran untuk pembangunan berkelanjutan. Meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen, khususnya keterwakilan dan suara substantif, dapat memelopori perubahan kebijakan di bidang-bidang yang sangat penting seperti pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, dan perawatan, yang semuanya krusial dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (UN Women, 2022).

Tingkat ketidaksetaraan yang tinggi dalam distribusi representasi, suara, dan pengaruh antara perempuan dan laki-laki dalam politik mengungkapkan adanya bias sadar

dan tidak sadar yang meluas terhadap perempuan (UN Women, 2018). Norma sosial, sikap tradisional, dan stereotip masih menjadi penghalang bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik, seringkali menempatkan mereka dalam peran subordinat. Tantangan ini diperparah oleh adanya kekerasan berbasis gender, seperti pelecehan seksual, pencemaran nama baik, intimidasi, dan ujaran kebencian, yang membuat karier politik menjadi tidak menarik dan menimbulkan rasa takut bagi perempuan. Sebagian besar anggota parlemen dan pengambil keputusan di tingkat nasional dan lokal masih didominasi oleh laki-laki, yang seringkali memiliki pemahaman terbatas tentang isu-isu kesetaraan gender.

Thailand memiliki sejarah panjang dalam keterlibatan perempuan dalam politik, yang semakin menguat dalam beberapa dekade terakhir. Lembaga parlemen perempuan Thailand, sebagai representasi signifikan dari partisipasi perempuan dalam politik, tidak hanya membawa perspektif gender dalam pengambilan keputusan tetapi juga memperkenalkan pendekatan komunikasi politik yang berbeda dalam menangani aspirasi publik. Peran perempuan dalam parlemen ini sangat penting karena mereka seringkali membawa perspektif dan pengalaman yang berbeda dalam memahami dan mengartikulasikan kebutuhan masyarakat.

Menurut penelitian (Waiphot Kulachai, 2024), yang berjudul *Political communication and political success: The art of effective messaging*, mengatakan bahwa komunikasi politik sangat penting dimiliki oleh anggota parlemen, karena dapat membentuk opini publik dan mempengaruhi sentimen publik. Misalnya, selama referendum konstitusi Thailand pada tahun 2016, berbagai aktor politik menggunakan pesan-pesan strategis untuk membingkai isu-isu yang dipertaruhkan dan mempengaruhi persepsi pemilih terhadap konstitusi yang diusulkan (Suriyasarn, 2017). Kampanye sangat bergantung pada strategi komunikasi politik untuk menjangkau dan berinteraksi dengan pemilih. Dalam pemerintahan, komunikasi politik sangat penting untuk menjelaskan inisiatif pemerintah, pengambilan kebijakan, dan mengelola ekspektasi publik (Stromer-Galley, 2014).

Melalui penelitian ini, pola komunikasi politik yang dikembangkan oleh Chitpas Tant Kridakorn akan dianalisis guna mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung efektivitasnya dalam menjembatani kepentingan publik dan kebijakan negara. Analisis ini juga bertujuan mengeksplorasi bagaimana peran gender memengaruhi proses komunikasi politik serta dampaknya terhadap representasi kepentingan masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam

tentang kontribusi parlemen perempuan Thailand, khususnya dalam komunikasi politik, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam politik Thailand.

CONCEPTUAL FRAMEWORK

A. Teori Komunikasi Politik

Komunikasi politik mengacu pada pertukaran informasi, pesan, dan ide antara aktor politik, seperti politisi, partai politik, pemerintah, dan warga negara. Hal ini mencakup berbagai strategi, saluran, dan teknik yang digunakan untuk menyampaikan pesan politik, membentuk opini publik, memobilisasi dukungan, dan mencapai tujuan politik (Strömbäck, 2014). Komunikasi politik dan komunikasi reguler masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam hal tujuan, audiens, metode penyampaian, dan konteks situasional. Komunikasi politik yang efektif sangat penting bagi politisi dan partai untuk terhubung dengan masyarakat, mengartikulasikan posisi kebijakan mereka, dan membujuk masyarakat untuk mendukung ide atau kandidat mereka. Hal ini melibatkan penyebaran informasi melalui pidato, pidato publik, siaran pers, wawancara, debat, dan bentuk keterlibatan media lainnya (McCombs, 2014).

Dalam bukunya *Handbook of Political Communication*, Nimmo dan Sanders (1981) menelusuri perkembangan bidang komunikasi politik sebagai suatu disiplin akademis pada paruh kedua abad ke-20, dan para sarjana lain telah menjelaskan luas dan ruang lingkup komunikasi politik. Banyak definisi komunikasi politik yang telah dikemukakan, namun tidak ada satupun yang diterima secara universal. Mungkin yang terbaik adalah yang paling sederhana: Steven H. Chaffee, mengatakan bahwa komunikasi politik adalah “peran komunikasi dalam proses politik” (Chaffee, 1975). Komunikasi politik berperan penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi sentimen publik (Matthes, 2018). Melalui pesan-pesan strategis, politisi dapat menyusun isu-isu, menekankan kebijakan-kebijakan utama, dan menggunakan perangkat retorik untuk membentuk cara masyarakat memandang peristiwa dan perkembangan politik (Jamieson, 2017).

B. Representasi Gender dalam Politik

Konsep gender dan politik menyoroti peran dan pengaruh gender dalam konteks politik. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana konstruksi sosial dari gender mempengaruhi pembagian kekuasaan, partisipasi politik, kebijakan publik, dan dinamika politik secara

keseluruhan. Secara umum, gender diistilahkan sebagai proses kompleks yang melibatkan konstruksi sosial identitas laki-laki dan perempuan dalam hubungannya satu sama lain. Namun, gender juga kerap dimaknai mengenai 'peran', misalnya pada materi tentang demokrasi dan keterwakilan, dimana gender difokuskan terhadap peran perempuan dalam politik (Goertz & Mazur, 2008).

Gender dan politik berkaitan dengan bagaimana posisi gender di masyarakat dalam partisipasi dan pengalaman dalam peristiwa-peristiwa politik. Secara historis dan lintas negara, gender telah menjadi faktor penentu utama dalam pendistribusian sumber daya, bagaimana kebijakan ditetapkan, dan siapa yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Para peneliti gender dan politik mempelajari bagaimana partisipasi dan pengalaman politik masyarakat berinteraksi dengan identitas gender mereka, dan bagaimana gagasan gender membentuk institusi politik dan pengambilan keputusan. Partisipasi politik perempuan dalam konteks sistem politik patriarki menjadi fokus kajian khusus.

Secara umum, perempuan diberikan hak untuk memilih dan menjadi kandidat lebih lambat dibandingkan laki-laki. Hal ini untuk waktu yang lama mengecualikan mereka dari partisipasi formal dan deskriptif. Meskipun ada klaim bahwa perempuan berpartisipasi melalui suara ayahnya dan kemudian suaminya dan parlemen yang secara eksklusif laki-laki mewakili mereka secara simbolis tidak adanya hak untuk memilih menyiratkan bahwa para wakil rakyat tidak bertanggung jawab secara langsung perempuan (Goertz & Mazur, 2008). Saat ini, perempuan di sebagian besar negara mempunyai hak yang sepenuhnya. Meskipun demikian, di sebagian besar negara bagian, perempuan masih mengalami hal tersebut kurang terwakili pada tingkat formal dan deskriptif, misalnya dalam daftar kandidat dan dalam majelis. Untuk mengatasi kurangnya keterwakilan lembaga-lembaga politik, undang-undang kesetaraan dan kuota telah diterapkan di lebih banyak negara untuk mendobrak hambatan yang menghambat partisipasi formal dan deskriptif perempuan (Goertz & Mazur, 2008, hal. 76).

C. Retorika Persuasif

Burke (1969, hlm. 72) menyatakan bahwa "di mana pun terdapat persuasi, di sana ada retorika. Dan di mana pun ada makna, di sana ada persuasi." Pernyataan ini sangat tepat dalam menekankan aspek persuasif dari retorika. Retorika hadir dalam semua bentuk

komunikasi, dengan persuasi sebagai elemen utamanya. Retorika didefinisikan sebagai "kemampuan untuk mengidentifikasi cara-cara persuasi yang mungkin dalam situasi tertentu" (Aristotle, 1954). Untuk mencapai keberhasilan dalam meyakinkan audiens, ada tiga pendekatan persuasif utama yang dikenal—ethos, pathos, dan logos—yang masing-masing berkaitan dengan karakter pembicara, emosi audiens, dan logika dari pesan yang disampaikan. Seperti yang diungkapkan oleh Aristoteles:

"...of the modes of persuasion furnished by the spoken word there are three kinds. The first kind depends on the personal character of the speaker; the second on putting the audience into a certain frame of mind; the third on proof, or apparent proof provided by the words of the speech itself." (Aristotle, 1954).

Tujuan utama dari penulisan persuasif adalah untuk membujuk pembaca bahwa ide yang disajikan adalah valid dan memiliki keunikan lebih dibandingkan ide lainnya. Aristoteles membagi pendekatan dan teknik persuasi menjadi tiga kategori: ethos, pathos, dan logos. Penjelasan mengenai ketiga konsep tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Definisi Konsep Ethos, Pathos dan Logos

Ethos	The art of convincing by the character of an author is referred to as Ethos (i.e. credibility), or ethical appeal. There is a tendency of believing people whom we respect. Projecting an impression to the reader that you are someone worth listening to is one of the central problems of argumentation, in other terms placing yourself as an author of an authority on the paper's subject, as well as a person who is both worthy of respect and likable
Pathos	The art of persuading by means of appealing to the emotions of readers is referred to as Pathos (i.e. emotional). Seeing how pathos, emotional appeals, are used to persuade can be based on texts ranging from classic essays to contemporary advertisements. An audience's emotional response can be affected by the choice of language, and an argument can be enhanced through the use of an effective emotional appeal.
Logos	Logos (i.e. logical) refers to a reasoning-based persuading. Deductive and inductive reasoning shall also be considered, as well as the discussion of what leads to a persuasive as well as an effective reason for the backup of claims. The heart of argumentation is based on 'giving reasons', and it cannot be over-emphasised. Kinds of support that could be used to authenticate a thesis shall be studied, as well as consideration of some logical fallacies that are common, in order to avoid them while writing.

Sumber: (Aristotle, Rhetoric. Edited by Ross, W.D., 1959)

D. Komunikasi Partisipatif

Srinivas R. Melkote dan H. Leslie Steeves dalam "*Communication for Development in the Third World*" (2001, edisi revisi 2015) menekankan pentingnya pendekatan partisipatif

dalam pembangunan, dengan masyarakat sebagai pusat dari proses tersebut (Servaes, 2015). Dalam konteks parlemen perempuan yang menyalurkan aspirasi publik, konsep ini dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya responsif tetapi juga berkelanjutan. Melkote dan Steeves menggarisbawahi bahwa pembangunan yang berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap proses, mulai dari identifikasi masalah hingga implementasi solusi. Komunikasi dalam konteks ini harus bersifat dialogis, di mana masyarakat tidak diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk menentukan kebutuhan dan solusinya (Servaes, 2015).

Pendekatan ini juga mendorong penggunaan media lokal dan alat komunikasi berbasis komunitas untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan pengambil kebijakan. Selain itu, Melkote dan Steeves menggarisbawahi pentingnya memahami konteks sosial, budaya, dan politik untuk memastikan keberhasilan komunikasi pembangunan. Parlemen perempuan dapat menggunakan radio komunitas, media sosial, atau podcast untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Selain itu, media dapat berfungsi sebagai ruang interaksi, di mana masyarakat dapat memberikan umpan balik terhadap kebijakan yang sedang dirancang (Dagron, 2014).

Pendekatan partisipatif yang diajukan Melkote dan Steeves tidak hanya memastikan keberlanjutan tetapi juga meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan. Hal ini penting bagi parlemen perempuan yang ingin menciptakan perubahan sosial yang mendalam, berjangka panjang, dan inklusif. Selain itu, Melkote dan Steeves menekankan bahwa evaluasi keberhasilan program pembangunan juga harus melibatkan partisipasi masyarakat (Melkote, 2018). Proses ini memastikan bahwa masyarakat dapat menilai apakah kebijakan telah memenuhi kebutuhan mereka dan memberikan saran untuk perbaikan. Parlemen perempuan dapat mengadakan forum evaluasi kebijakan bersama masyarakat, di mana mereka dapat mendiskusikan dampak dari kebijakan yang telah diimplementasikan. Pendekatan ini juga menciptakan akuntabilitas bagi para pembuat kebijakan (Melkote, 2018).

Melkote dan Steeves menggarisbawahi bahwa dalam upaya pembangunan berkelanjutan, penting untuk membangun keterlibatan jangka panjang antara pengambil kebijakan dan masyarakat. Ini tidak hanya mengandalkan komunikasi satu arah, melainkan mengedepankan komunikasi dua arah yang kontinu, yang memungkinkan adanya

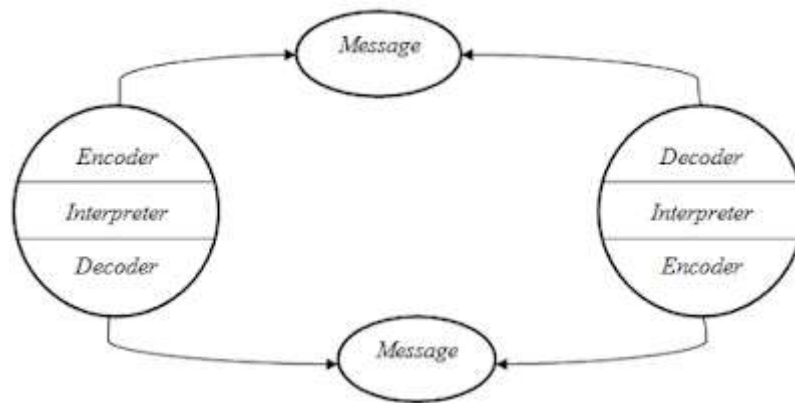
pertukaran ide dan informasi sepanjang waktu. Parlemen perempuan, sebagai lembaga yang berfungsi menyalurkan aspirasi publik, dapat memanfaatkan pendekatan ini dengan mendorong dialog berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam setiap fase kebijakan. Dengan cara ini, bukan hanya kebijakan yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang tercipta, tetapi juga dapat terjalin hubungan yang lebih kuat antara wakil rakyat dan konstituen mereka (Melkote, 2018) . Pendekatan ini akan menciptakan kepercayaan yang lebih besar terhadap lembaga legislatif, sekaligus memperkuat proses demokrasi yang lebih inklusif.

E. Pola Komunikasi

Pola komunikasi merujuk pada cara aktor berinteraksi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses menggunakan strategi dan metode tertentu. Adapun secara umum, pola komunikasi itu merupakan cara seseorang atau kelompok itu berkomunikasi. Terdapat empat (4) pola komunikasi secara umum, yaitu pola komunikasi primer, sekunder, linear, dan sirkuler.

Orientasi pengertian komunikasi sebagai suatu proses adalah bahwa komunikasi itu proses yang kompleks, berlanjut dan tidak bisa berubah dengan sendirinya. Wilbur Schramm dan Charles E. Osgood, mengatakan bahwa komunikasi sirkuler menitik beratkan pembahasan pada perilaku pelaku-pelaku utama dalam proses komunikasi. Menurut Schramm (1954), komunikasi senantiasa membutuhkan setidaknya tiga unsur, yaitu sumber (*source*), pesan (*message*) dan sasaran (*destination*). Sumber boleh jadi seorang individu (berbicara, menulis, menggambar, memberi isyarat) atau suatu organisasi komunikasi (seperti penerbit, stasiun televisi, atau studio film). Pesan dapat berbentuk tinta pada kertas, gelombang suara di udara, impuls dalam arus listrik, lambaian tangan, bendera di udara atau setiap tanda yang dapat ditafsirkan. Sasarannya mungkin seorang individu yang mendengarkan, menonton atau membaca, atau anggota suatu kelompok seperti kelompok diskusi, kumpulan penonton sepak bola, atau khalayak media massa (Mulyana, 2005).

Pola komunikasi melingkar adalah jenis interaksi di mana informasi mengalir secara melingkar di antara para partisipan, bukan secara linier atau hierarkis. Pola komunikasi melingkar menekankan kolaborasi, konsensus, dan kesetaraan di antara para komunikator.



Gambar 1. Model Komunikasi oleh Osgood dan Schramm
Sumber: Pengantar Ilmu Komunikasi, Hafied Cangara

Gambar di atas menunjukkan model Komunikasi Sirkuler atau yang disebut Komunikasi Dua Arah merupakan lanjutan dari pendekatan komunikasi satu arah. Pada model komunikasi dua arah diperkenalkan gagasan tentang umpan balik (*feedback*). Dalam model ini, penerima (*receiver*) melakukan seleksi, interpretasi dan memberikan respon terhadap pesan dari pengirim (*sender*). Komunikasi dalam model ini dikatakan dua arah dimana setiap partisipan memiliki peran ganda, dalam arti pada suatu saat bertindak sebagai sender, namun pada suatu waktu yang lain berlaku sebagai *receiver* (Cangara H. , 2018).

Pola komunikasi sirkuler, juga dikenal sebagai model komunikasi transaksional, adalah konsep yang menggambarkan komunikasi sebagai proses saling berinteraksi antara dua atau lebih individu yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam pola komunikasi melingkar, pesan tidak hanya dikirim dari satu pihak ke pihak lain, tetapi juga kembali ke pihak asal sebagai tanggapan atau umpan balik.

METHODOLOGY

Penelitian ini merupakan kajian fenomenologi, yaitu pendekatan penelitian kualitatif yang berupaya memahami dan mendeskripsikan esensi universal suatu fenomena. Pendekatan ini menyelidiki pengalaman sehari-hari manusia dengan menanggukuhkan asumsi-asumsi yang telah terbentuk sebelumnya dari para peneliti tentang fenomena tersebut. Penelitian fenomenologis memungkinkan studi mendalam tentang pengalaman hidup untuk mendapatkan wawasan yang lebih kaya tentang bagaimana individu memahami pengalaman mereka (Groenewald, 2004). Dalam penelitian ini, terdapat dua tujuan utama:

(1) mengeksplorasi pengalaman subjek dalam kepemimpinan perempuan; dan (2) menguraikan makna atau hasil pemahaman peneliti terhadap pengalaman tersebut. Subjek penelitian adalah anggota parlemen perempuan Thailand, Chitpas Tant Kridakorn.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis strategi penyaluran aspirasi publik oleh Chitpas Tant Kridakorn melalui pola komunikasi politik. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokusnya pada pemahaman mendalam mengenai proses, pola, dan makna di balik strategi komunikasi yang diterapkan oleh subjek dalam konteks sosial-politik yang beragam.

Tabel 2. Data Informan

<p>THAILAND</p>  	<p>Personal Information:</p> <p>Name : Chitpas Tant Kridakorn Address : 136/7 Amnouysongkarm Road, Dusit, Bangkok, 10300, Thailand Telephone : 668 3544 2442 Date of birth : 16 June 1985 Parents : Father - Mr. Chutinant Bhirombhakdi. Mother - M.L. Piyapas Sibling : Sister – Ms. Nantaya B., Brother – Mr. Naiyanobh B.</p>
<p>Education :</p> <p>1996 – 1999 : Godstowe School, Buckinghamshire, England 1999 – 2003 : Westonbirt School, Gloucestershire, England 2004 – 2006 : King’s College, University of London, England 2011 – 2013 : Political Science MA, Chulalongkorn University, Thailand 2022 – Present : Ph.D in Criminology & Criminal Justice, Chulalongkorn University, Thailand</p>	
<p>Political Fields :</p> <p>2023 – Present : Deputy Leader of the Democrat Party, Thailand 2023 – Present : Advisor of the Police’s committee of the house of representative’s 2020 – 2023 : Vice Chairperson of the Police’s committee of the house of representative’s 2019 – 2023 : Women Political Leaders (WPL) Ambassador for Thailand 2019 - 2023 : Coordinating Committee for The House of Representatives, Government 2019 - 2023 : Committee of Thai Women Parliamentarian 2019 : Spokesman for Welfare Commission, The House of Representatives 2019 – 2023 : Member of The House of Representatives – Party List, The Democrat Party 2018 – 2023 : Deputy Secretary General of the Democrat Party 2016 – 2019 : Committee & Assistant Secretary, PDRC Foundation 2011 – 2014 : Deputy Spokesperson, The Democrat Party 2011 : Member of The House of Representatives Candidate, Bangkok</p>	

2011	: Specialist to the Committee on Economic Development of The House of Representatives
2010 – 2011	: Secretary to Information and Communication Technology Minister
2009	: Political Official Attached to the Secretariat of the Prime Minister
2008 – 2009	: Secretary of the Standing Committee on Student Youth Women Elderly and Handicapped
2008	: Assistant to Deputy Prime Minister Dr. Sahas Bunditkul
Work Experience :	
2010	: Assistant Manager, 10 th Asian Para Games, Guangzhou, The Republic of China
2007	: PDA Bangkok
2007	: Thai Rath Newspaper, Bangkok
2006	: Polyplus PR, Bangkok
2004 – 2005	: International Marketing Executive for Boonrawd Trading LTD London
2004	: Volunteered work for Red Cross during Tsunami disaster in Phuket

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan tunggal serta studi pustaka untuk mendukung analisis data.

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara bertahap dengan Ibu Chitpas Tant Kridakorn sebagai informan tunggal. Komunikasi dilakukan melalui email yang ditujukan ke alamat email pribadi informan. Dalam penelitian ini, sebanyak 5 email dikirimkan, yang masing-masing berisi daftar pertanyaan dan permintaan klarifikasi. Wawancara berlangsung hingga mencapai titik jenuh data, yakni ketika tidak ada informasi baru yang diperoleh dari informan. Pertanyaan yang diajukan mencakup pengalaman informan dalam menjalankan fungsi parlemen, strategi komunikasi politik yang digunakan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam memperjuangkan aspirasi publik. Metode wawancara melalui email dipilih karena memberikan fleksibilitas waktu bagi informan dan memungkinkan jawaban yang lebih reflektif.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mendukung analisis dan interpretasi data wawancara. Literatur yang dikaji meliputi jurnal akademik, buku, laporan penelitian, serta sumber resmi seperti website pemerintah dan organisasi internasional. Topik-topik yang relevan termasuk komunikasi politik, partisipasi politik perempuan, dan dinamika parlemen di Thailand.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis tematik, dengan langkah-langkah berikut:

1. Transkripsi dan Organisasi Data: Data dari wawancara melalui email ditranskrip dan diklasifikasikan berdasarkan tema utama.
2. Pengodean Awal: Pola dan tema awal diidentifikasi dari data transkripsi.
3. Pengembangan Tema Utama: Tema-tema mendalam dipetakan berdasarkan hubungan pola, seperti strategi komunikasi politik, hambatan yang dihadapi, serta respons publik terhadap strategi tersebut.
4. Interpretasi dan Kesimpulan: Tema-tema utama diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang peran perempuan di parlemen dalam komunikasi politik.

Validitas Data

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan metode triangulasi, yaitu:

1. Kombinasi Sumber Data: Membandingkan hasil wawancara dengan literatur yang relevan, seperti laporan resmi dan penelitian sebelumnya.
2. Konsultasi dengan Ahli: Data dan interpretasi dianalisis kembali melalui diskusi dengan ahli di bidang komunikasi politik dan partisipasi politik perempuan, guna mengurangi bias peneliti.

Pendekatan ini memberikan kedalaman analisis dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

FINDINGS & DISCUSSION

A. Hasil Penelitian

Menurut *World Economic Forum*, kepemimpinan perempuan di bidang politik terbukti bermanfaat secara sosial dan merupakan persoalan hak perempuan atas kesempatan dan akses yang setara (World Economic Forum, 2017). Kehadiran pemimpin perempuan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam memperkuat representasi dan keberagaman dalam pengambilan keputusan publik. Pemimpin perempuan dapat membawa suara dan kepentingan yang mungkin tidak terwakili dengan baik sebelumnya. Dalam konteks ini, pemimpin perempuan dapat memperluas cakupan isu-isu yang dianggap penting dan memperjuangkan kebutuhan beragam kelompok masyarakat. Misalnya, dalam hal peningkatan prioritas isu-isu sosial, seperti kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, kelompok minoritas dan lain-lain (World Economic Forum, 2017).

Kehadiran perempuan di parlemen juga bisa memberikan efek teladan. Sebuah penelitian menggarisbawahi pentingnya panutan perempuan bagi individu dari semua gender untuk menormalkan “gagasan dan praktik perempuan yang memegang kekuasaan” (O’Neil, Tam, Plank, & Domingo, 2015). Strategi dalam penyerapan dan penyaluran aspirasi publik oleh parlemen perempuan Thailand, memiliki pola komunikasi yang cenderung menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam berkomunikasi dengan publik. Hal ini peneliti dapatkan melalui hasil wawancara serta observasi media sosial parlemen perempuan Thailand, dalam kasus ini peneliti mewawancarai salah satu anggota parlemen perempuan Thailand Chitpas Tant Kridakorn. Ia merupakan anggota parlemen dari partai Demokrat Thailand pada 2019-2023.

Menurut (Eagly A. H., 1990), Gender mempengaruhi gaya kepemimpinan sekaligus mempengaruhi hasil. Pemimpin perempuan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan, sedangkan pemimpin laki-laki menghargai pengetahuan dan kendali (Lemoine, Aggarwal, & Steed, 2016). Perempuan menunjukkan emosi yang lebih positif dibandingkan laki-laki ketika menghadapi kesulitan, sehingga memungkinkan mereka untuk mengevaluasi kembali dampak buruk krisis dan mengembangkan respons yang lebih adaptif (Hülsheger, 2013).

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik, khususnya di kawasan Asia Tenggara, kerap menghadapi tantangan yang kompleks. Meski demikian, kehadiran anggota parlemen perempuan membawa perspektif baru dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang inklusif. Salah satu tokoh yang menjadi inspirasi dalam konteks ini adalah seorang anggota parlemen perempuan dari Thailand yang berhasil mengintegrasikan visi

personal, pengalaman, serta strategi komunikasi politik yang efektif dalam menjalankan tugasnya.

Melalui wawancara mendalam, informan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perjalanan politiknya, visi dan misinya sebagai wakil rakyat, hingga berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, wawancara juga mengungkap cara informan menghadapi tantangan berbasis gender dan strategi untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat luas, termasuk kelompok rentan. Narasi berikut merangkum poin-poin utama yang diangkat dalam wawancara ini.

Tabel 3. Hasil Wawancara

Pertanyaan	Jawaban	Kategori Tema	Catatan Tambahan
Bagaimana latar belakang/ceritanya ibu masuk dalam dunia politik dan memilih bertanding menjadi anggota parlemen melalui pemilu?	Saya putri tertua dari tiga bersaudara... Saya memilih menjadi politisi karena politik sangat penting bagi kemajuan masyarakat, ekonomi, dan politik, serta ingin menjadi perdana menteri perempuan.	Latar Belakang dan Motivasi	Informasi mencakup pendidikan, pengalaman, dan inspirasi pribadi.
Bagaimana terkait visi dan misi ibu sebagai anggota parlemen?	Mewakili kekuatan perempuan, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan untuk kualitas yang baik.	Visi dan Misi	Penekanan pada nilai inklusivitas dan demokrasi.
Kebijakan/Program apa yang telah dilakukan dan bermanfaat bagi masyarakat?	Program Polisi Patroli Perbatasan, Program Masyarakat Anti Narkoba, jaringan pelajar untuk berita komunitas, dan upaya mengurangi kejahatan serta masalah sosial dan ekonomi.	Kebijakan dan Program	Fokus pada keamanan komunitas, pendidikan, dan pengurangan narkoba.
Bagaimana hasil dari kebijakan/program tersebut?	Anak-anak Thailand memiliki lebih banyak kesempatan meningkatkan kualitas hidup mereka saat komunitas bebas narkoba dan kuat, yang berperan penting dalam pembangunan negara.	Dampak Kebijakan	Berorientasi pada kualitas hidup anak-anak dan pembangunan nasional.
Bagaimana Ibu melakukan pengamatan terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat?	Memperhatikan isu dan masyarakat untuk mengembangkan kebijakan yang relevan.	Pengamatan dan Identifikasi	Strategi berbasis observasi langsung.
Apa langkah-langkah yang Ibu ambil untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dalam proses observasi?	Mengumpulkan data, menganalisisnya, dan bekerja dengan tim yang dapat dipercaya.	Observasi	Menekankan pentingnya analisis dan tim terpercaya.
Bagaimana ibu memastikan	Kebijakan memiliki penerima	Inklusivitas	Pendekatan

bahwa perasaan yang ditangkap dari masyarakat tercermin secara adil dan inklusif dalam kebijakan?	manfaat langsung dan tidak langsung. Dalam jangka panjang, mayoritas masyarakat mendapatkan keuntungan.	Kebijakan	berorientasi jangka panjang.
Apakah terdapat tantangan sebagai “Anggota Parlemen Perempuan” di ruang politik?	Sebagai perempuan anggota parlemen, saya harus menjadi teladan, menunjukkan kekuatan, keyakinan, dan kerendahan hati dalam profesi ini.	Tantangan Gender	Memberikan teladan dan kepemimpinan sebagai respons terhadap tantangan gender.
Bagaimana pola komunikasi ibu dalam menghadapi dan menyelesaikan tantangan yang mendiskreditkan perempuan?	Pola komunikasi yang dapat mendiskreditkan perempuan bisa disebabkan oleh masalah komunikasi dan citra. Ini akan berkurang jika komunikasi jelas dan citra positif ditunjukkan.	Pola Komunikasi	Komunikasi jelas dan citra positif sebagai strategi utama.
Program/kebijakan apa yang ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok rentan?	Program kesejahteraan sosial termasuk bantuan sosial, program pendidikan, akses layanan kesehatan, dan perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat miskin lintas generasi.	Program Sosial	Pendekatan menyeluruh terhadap kebutuhan kelompok rentan.
Bagaimana ibu menjembatani permintaan masyarakat dengan kebijakan yang ibu implementasikan?	Mendengarkan, mengomunikasikan, dan memahami aspirasi masyarakat.	Proses Kebijakan	Pendekatan berbasis komunikasi dan dialog.
Bagaimana tanggapan ibu terkait masalah kelompok rentan yang terjadi di masyarakat?	Menggunakan mekanisme politik dan negara untuk mengatasi masalah kelompok rentan seperti disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin.	Penanganan Kelompok Rentan	Penekanan pada peningkatan kualitas hidup kelompok rentan.

Olahan data penulis

Pada hasil wawancara peneliti dengan parlemen perempuan Thailand, Chitpas Kridakorn, terkait aspirasi kebijakan. Ia menyatakan bahwa dalam proses pengamatan terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat, ia memperhatikan terlebih dahulu isu dan kondisi masyarakat. Hal ini diperlukan agar masalah yang berbeda dalam kebijakan dapat diatasi secara efektif.

“...a good politician must be observe the conditions with the issues and the people before they can develop any policies and designate tasks and assignments according to their abilities. In order for different policies to effectively address the issue.” – Chitpas Kridakorn (Anggota Parlemen Thailand)

Dalam wawancara tersebut, Chitpas Kridakorn menyatakan bahwa seorang politisi yang baik harus mengamati kondisi masyarakat, isu-isu yang ada, dan memahami kebutuhan mereka sebelum dapat mengembangkan kebijakan dan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang sesuai. Dengan memperhatikan isu-isu yang relevan dengan

masyarakat, seorang politisi dapat mengidentifikasi masalah yang berbeda yang memerlukan perhatian dan penyelesaian. Dalam pengembangan kebijakan, penting untuk memastikan bahwa berbagai isu dan permasalahan yang berbeda ini diatasi secara efektif melalui kebijakan yang sesuai dan tugas yang ditugaskan kepada berbagai pihak yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang relevan.



Gambar 2. Chitpas Come to School on the Border to See "School Without Electricity"
Sumber: Sosial Media Instagram @chitpas (1 September 2020)

Proses observasi yang dilakukan Chitpas, salah satunya dengan mendatangi langsung sekolah yang memiliki masalah aksesibilitas. Ini adalah sekolah Perbatasan, Ban Khlong Wai yang terletak di kecamatan Pak Chalui, Distrik Vibhavadi, Provinsi Surat Thani. Chitpas datang untuk melihat langsung dan mendengarkan permasalahan, dimana di desa ini terdapat masalah kelistrikan yang membuat sekolah juga mengalami hambatan.

"....The electricity system often fails. Therefore, it is necessary to use a generator transformer, especially since there is a lack of vehicles to visit students and their parents in the villages. Because several villages are in remote areas. In addition, the condition of the school buildings is currently in a dilapidated condition. All of these problems will be submitted to the Police Commission. The House of Representatives is taking this into consideration and coordinating with the relevant agencies to find a solution." – Chitpas Kridakorn (Anggota Parlemen Thailand)

Chitpas juga menyebutkan bahwa kondisi bangunan sekolah saat ini dalam keadaan rusak. Semua permasalahan ini akan diajukan ke Dewan Perwakilan rakyat, dan sedang mempertimbangkan hal ini dan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mencari solusi. Dalam konteks kebijakan, langkah-langkah yang diambil oleh Chitpas menunjukkan komitmen dan upaya untuk mengatasi masalah aksesibilitas sekolah. Dengan mengunjungi

secara langsung dan mendengarkan permasalahan, ia dapat mengumpulkan informasi yang akurat dan memahami kebutuhan masyarakat yang dilayani. Tindakan ini mencerminkan pendekatan yang responsif dan berfokus pada pemecahan masalah dalam pengembangan kebijakan.

Chitpas juga membawa permasalahan ini ke komisi kepolisian. Sebagai ketua penasihat komite polisi kerajaan Thailand, ia merasa pihak komisi kepolisian memiliki tanggung jawab. Chitpas mengatakan bahwa, aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya dengan penuh moral dan etika dan sebagai tempat perlindungan rakyat.



Gambar 3. Study tour at Regional Police Education and Training Center Region 8 on behalf of the Police Commission. The House of Representatives, together with MP Somchat Praditphon, MP for Surat Thani District 4, as vice president of the Police Commission.

Sumber: Sosial Media Instagram @chitpas (29 September 2020)

Dari rapat tersebut, dibahas mengenai masalah-masalah yang ada, terutama terkait kurangnya anggaran untuk perbaikan. Masalah-masalah seperti desa yang tertinggal dan sekolah yang kekurangan fasilitas menjadi fokus pembahasan. Chitpas, sebagai anggota parlemen, mengambil tindakan dengan meminta kerjasama dari semua pihak untuk membantu mengatasi masalah-masalah tersebut.

“I want to be another voice supporting this bill for the future of Thailand's young generation who deserve full opportunities for quality education.” – Chitpas Kridakorn (Anggota Parlemen Thailand)

Dalam konteks ini, langkah-langkah yang diambil oleh Chitpas menunjukkan komitmen untuk mencari solusi yang efektif. Dalam upayanya untuk mengatasi masalah desa yang tertinggal dan sekolah yang kurang fasilitas, Chitpas menyadari bahwa diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Dengan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, diharapkan masalah-masalah tersebut dapat diatasi

secara lebih holistik dan berkelanjutan. Dalam upaya mengatasi masalah ini, Chitpas berharap bahwa desa-desa yang tertinggal dan sekolah yang kekurangan fasilitas akan mengalami perubahan yang positif. Perbaikan fasilitas dan aksesibilitas yang memadai akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa. Selain itu, ini juga akan berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

Pada hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Anggota Parlemen perempuan Thailand, Chitpas Kridakorn, ia mengatakan bahwa:

P: “Seeing and hearing people's complaints, how do you ensure that the feelings you capture from the community are reflected in your policies in a fair and inclusive manner?”

I: “The policy does, in fact, have both direct and indirect beneficiaries in addition to those who are impacted by it. In the long run, most people gain as people's quality of life rises.”

Dalam pertanyaan yang diajukan, Chitpas Kridakorn ditanya tentang bagaimana dia memastikan bahwa perasaan yang dia tangkap dari masyarakat tercermin dalam kebijakan-kebijakan dengan cara yang adil dan inklusif. Dalam tanggapannya, dia menyatakan bahwa kebijakan tersebut memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat, dan pada akhirnya, kehidupan masyarakat akan meningkat.

Pertanyaan lanjutan yang peneliti ajukan mengenai jawaban nya terkait “manfaat secara langsung dan tidak langsung”, ia memberikan contoh mengenai pernyataan tersebut.

“....The policy regarding the allocation of education funds for schools will directly benefit the students. They will be equipped with good facilities to enhance their abilities. The indirect benefit is for the country itself. By providing quality education facilities for the students, we can nurture a talented younger generation who will bring progress and prosperity to the nation.” – Chitpas Kridakorn (Anggota Parlemen Thailand)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Chitpas Kridakorn menyadari pentingnya mengakomodasi perasaan dan aspirasi masyarakat dalam kebijakan-kebijakan yang dia hasilkan. Dia berpendapat bahwa kebijakan yang baik akan memberikan manfaat yang meluas kepada masyarakat secara keseluruhan dengan meningkatkan kualitas hidup mereka. Analisis teks ini menyoroti pentingnya pemahaman dan pengakuan terhadap perasaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan perasaan masyarakat, anggota parlemen perempuan ini berusaha untuk menciptakan kebijakan yang adil dan inklusif, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umum.

Rasa empati yang dimiliki Chitpas fokus kepada kebijakannya terkait anak-anak. Hal ini dapat dilihat bagaimana ia banyak bergerak dibidang anak-anak dan pendidikan. Mengutip dari *caption* pada laman instagramnya, ia mengatakan *“I would like to be a part of creating smiles, giving happiness, and fulfilling opportunities for children today. To grow into good adults for the nation in the future”* (Chitpas, 2024) Dengan rasa empati yang dimilikinya, Chitpas ingin memberikan kontribusi positif bagi anak-anak saat ini dan masa depan mereka. Hal ini menunjukkan kesadaran dan komitmennya terhadap kesejahteraan dan perkembangan generasi muda, yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi negara di masa depan.

P: *“How do you recognize community needs and fulfill them in designing relevant and effective policies/programs?”*

I: *“Collect data and analyze it, find out what it means”*

Chitpas mengakui pentingnya pengumpulan data dan analisis dalam memahami kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, mereka dapat merancang kebijakan atau program yang sesuai dengan kebutuhan komunitas yang mereka wakili. Pendekatan yang didasarkan pada pengumpulan data dan analisis ini menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diusulkan oleh anggota parlemen perempuan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang relevan dan efektif. Dengan memahami 'needs' komunitas, anggota parlemen perempuan dapat menunjukkan tanggapan yang lebih baik terhadap aspirasi publik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang mereka wakili.

Pada halaman instagram Chitpas, ia mengatakan menerima pengaduan dari masyarakat terkait sumber air yang digunakan untuk pertanian mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, Chitpas bersama timnya langsung segera mengunjungi dan melihat secara langsung.



Gambar 4. Chitpas Saat Mengunjungi Area bermasalah, di Provinsi Chiang Rai
Sumber: Sosial Media Instagram @chitpas (20 Juni 2023)

“As a new generation politician, Tan attaches great importance to the problems and suffering of the people. Even though they belong to different political parties. Or not become a member of parliament, but what can we do to work together? to coordinate assistance. To continue to serve in all regions of the country. For the greatest benefit of the people.” – Chitpas Kridakorn (Anggota Parlemen Thailand)

Chitpas mengatakan bahwasannya ia sangat mementingkan masalah dan penderitaan rakyat. Ia berusaha untuk mengabdikan diri di seluruh wilayah tanah air untuk kemaslahatan rakyat. Solusi yang Chitpas berikan adalah mengoordinasikan pembangunan waduk, dan perbaikan bendungan penyimpanan air. Ketika mendengar keluhan masyarakat, penggunaan NVC ini melibatkan pendengaran yang empatik, yaitu kemampuan untuk mendengar dengan penuh perhatian dan empati terhadap emosi dan kebutuhan orang lain. Dengan pendekatan ini, NVC bertujuan untuk menciptakan iklim komunikasi yang saling menguntungkan, di mana setiap pihak merasa didengar, dipahami, dan dihargai.

Chitpas juga mengatakan bahwa dalam memastikan permintaan masyarakat yang mencerminkan keinginan dan aspirasi masyarakat luas, ia menekankan untuk mendengar dari semua kelompok orang. kemudian, mengambil tindakan dan meminta kerjasama dari semua sektor yang terkena dampak.

“...Listen to all groups of people and take action on their own, and ask for cooperation from all affected sectors.” – Chitpas Kridakorn (Anggota Parlemen Thailand)

Chitpas juga mengatakan dalam wawancara lanjutan yang peneliti lakukan, ia mengatakan bahwa:

“ปัญหาของกลุ่มคนเปราะบางจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไขกิโลทางการเมือง ควบคู่ไปกับกลไกของรัฐ เข้าไปจัดการแก้ไขอย่างจริงจังโดยเร่งด่วน...” (“Masalah kelompok rentan, penting untuk

menggunakan mekanisme politik serta masuk dalam mekanisme negara dan selesaikan masalah dengan serius dan segera... ") - Chitpas Kridakorn (Anggota Parlemen Thailand)



Gambar 5 "Chitpas" menciptakan model solusi Thailand 4.0 untuk mendorong agenda nasional. "Meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan"
Sumber: Sosial Media Democrat Party (5 Oktober 2023)

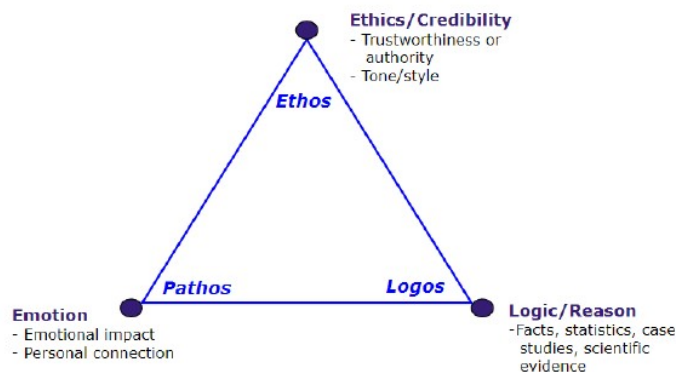
Chitpas mengatakan pentingnya mempercepat penyelesaian masalah kesenjangan dalam masyarakat Thailand yang semakin hari semakin parah hingga menjadi masalah sosial struktural. Saat ini, kelompok yang paling mengkhawatirkan adalah kelompok masyarakat rentan yang mempunyai risiko lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum. Baik itu penyandang disabilitas, anak-anak, remaja, lansia, tunawisma, atau bahkan narapidana yang sudah keluar dari penjara. Orang-orang ini membutuhkan perawatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Mengurangi kesenjangan kesenjangan sosial.

B. Temuan Penelitian

Selain kemampuan pemimpin perempuan dalam menyerap aspirasi melalui komponen diatas, penting juga bagi pemimpin perempuan untuk mampu memiliki gaya komunikasi yang memiliki strategi untuk mempengaruhi, meyakinkan, dan mengubah pandangan seseorang. Dalam konteks retorika persuasif, pemimpin perempuan harus mampu memiliki strategi yang mumpuni dalam meyakinkan dan mencapai tujuan persuasif. Seruan retorik mengacu pada ethos, pathos, dan logos. Ini adalah istilah Yunani klasik, yang berasal dari Aristoteles, yang secara tradisional dipandang sebagai bapak retorika. Agar retorikanya efektif (dan dengan

demikian persuasif), seorang pemimpin harus memperhatikan tiga elemen penting dalam seruan retorik, yaitu *logos*, *pathos*, dan *ethos*.

Ethos (Etika), pemimpin perempuan harus membangun *ethos* yang kuat, yaitu kredibilitas dan kepercayaan. Untuk mencapai ini, pemimpin perempuan harus menunjukkan integritas, keahlian, pengalaman yang relevan, dan komitmen terhadap nilai-nilai yang dihormati. *Pathos* (Emosi), pemimpin perempuan harus mampu menghubungkan dengan emosi. Mereka dapat menggunakan cerita, contoh konkret, atau bahasa yang menggerakkan emosi untuk menarik perhatian dan membangkitkan emosi yang relevan. Menggugah emosi dapat membantu membangun ikatan emosional dan mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. *Logos* (Logika), pemimpin perempuan harus menggunakan logika yang kuat dan argumen yang terorganisir dengan baik. Mereka harus menyajikan fakta yang akurat, bukti yang relevan, dan argumen yang berdasarkan pemikiran rasional. *Logos* yang kuat membantu membangun kepercayaan intelektual dan meyakinkan bahwa pandangan dan tindakan yang dilakukan adalah yang terbaik.



Gambar 6. Aristotle's Rhetorical Triangle
Sumber: Stanford Encyclopedia of Philosophy

Chitpas Kridakorn, merupakan anggota parlemen Thailand yang menunjukkan citra diri dengan baik. Dia terkenal karena kepribadiannya yang percaya diri, tegas, dan berani dalam menyuarakan pendapatnya. Chitpas Kridakorn juga menunjukkan integritas yang tinggi, dengan konsistensi antara kata-kata dan tindakan yang memperkuat citra dirinya. Selain itu, Chitpas Kridakorn juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dia mampu berbicara dengan jelas dan persuasif, serta dapat menyampaikan pesan-pesan politiknya dengan efektif kepada publik. Gaya komunikasinya yang meyakinkan dan berfokus pada isu-isu yang

penting membuatnya menjadi pemimpin yang dapat mempengaruhi dan memperoleh dukungan dari masyarakat.

“....Sebagai perempuan anggota parlemen, saya harus menjadi teladan dan menunjukkan kekuatan, keyakinan terhadap apa yang benar, dan kerendahan hati dalam profesinya.” – Chitpas Kridakorn (Anggota Parlemen Thailand)

Selain manfaat langsung, kebijakan bantuan anggaran pendidikan juga dapat memberikan manfaat tidak langsung bagi masyarakat. Misalnya, dengan meningkatnya kualitas pendidikan, akan ada peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat secara keseluruhan, yang dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan pengurangan kesenjangan sosial.

Melalui penyajian argumen Chitpas yang terorganisir dengan baik, penggunaan fakta yang akurat, serta logika berpikir yang kuat, Chitpas menggunakan gaya komunikasi persuasifnya dalam meyakini ketua parlemen dalam sidang yang berlangsung tentang kebenaran dan kepentingan dari pandangannya. Hal ini termasuk salah satu apa yang dimaknai sebagai *logos* dalam retorika.



chitpas It's a council job. We have to do our best. #ประชาธิปไตย
#ห้องเรียนชีวิตจริง #ยิ่งกว่าตัวสอบก็เตรียมข้อมลอภิปรายนี้แหละ

Gambar 7. Chitpas's Caption on Her Instagram as a Parliament

Sumber: Sosial Media Instagram @chitpas (22 Januari 2022)

Kemudian pada gambar diatas, terdapat penegasan Chitpas terkait tugas sebagai anggota parlemen. Retorika persuasif yang digunakan Chitpas terkait penjabaran diatas, dapat dilihat dari beberapa elemen; Pertama (*pathos*), Chitpas menggunakan bahasa yang kuat dan emosional untuk menyoroti pentingnya kebijakan bantuan anggaran pendidikan dan manfaat jangka panjangnya bagi masyarakat. Menggunakan kata-kata seperti "keuntungan", "peningkatan kualitas hidup", dan "manfaat langsung dan tidak langsung" membantu menciptakan dorongan emosional dan memberikan argumen yang meyakinkan.

Kedua (*logos*), Chitpas menekankan fakta dan logika dalam pernyataannya. Dia menyampaikan keyakinannya bahwa kebijakan bantuan anggaran pendidikan akan memberikan manfaat jangka panjang yang melebihi dampak negatifnya. Pendekatan ini memberikan dasar rasional dan membuat argumen yang lebih kuat. Ketiga (*ethos*), Chitpas menggunakan otoritas dan kepercayaan diri dalam pernyataannya. Dia menyebutkan

posisinya sebagai anggota parlemen Thailand, yang memberikan bobot dan kekuatan pada argumennya. Ini membantu membangun kredibilitas dan meyakinkan audiens bahwa pandangannya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang relevan. Terakhir, Chitpas menunjukkan keberanian dan niat untuk bertindak dengan mengirimkan pesan kepada pihak berwenang. Ini mencerminkan komitmen dan dedikasinya terhadap perubahan yang diinginkan dan menunjukkan bahwa dia memiliki kepentingan yang tulus dalam memperjuangkan kebijakan tersebut.

Dalam pola komunikasi Chitpas, temuan peneliti dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi media massa terkait bagaimana penyerapan dan penyaluran aspirasi. Hal tersebut peneliti petakan dala empat aspek, terkait *Empathy, Collaboration, Authenticity, dan Freedom*. Rasa empati yang dimiliki Chitpas fokus kepada kebijakan nya terkait anak-anak. Hal ini dapat dilihat bagaimana ia banyak bergerak dibidang anak-anak dan pendidikan. Mengutip dari *caption* pada laman instagram nya, ia mengatakan;

“..I would like to be a part of creating smiles, giving happiness, and fulfilling opportunities for children today. To grow into good adults for the nation in the future”

Dengan rasa empati yang dimilikinya, Chitpas ingin memberikan kontribusi positif bagi anak-anak saat ini dan masa depan mereka. Hal ini menunjukkan kesadaran dan komitmennya terhadap kesejahteraan dan perkembangan generasi muda, yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi negara di masa depan. Pada hasil *collaboration* Chitpas mengatakan bahwa pentingnya memiliki tim yang bisa dipercaya dalam mengawasi kebijakan. Ini menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif membutuhkan kerja sama tim yang solid dan saling percaya. Tim yang dapat dipercaya akan membantu dalam pengumpulan data, analisis data, dan memberikan masukan yang berharga dalam proses pengambilan keputusan.

“....Collect data and analyze it, figuring out what it means and also having a team you can trust is vital in keeping an eye on policy”.

Pada masalah fasilitas sekolah yang tidak terpenuhi juga, Chitpas membawa permasalahan ini ke komisi kepolisian. Sebagai ketua penasihat komite polisi kerajaan Thailand, ia merasa pihak komisi kepolisian memiliki tanggung jawab. Chitpas mengatakan

bahwa, aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya dengan penuh moral dan etika dan sebagai tempat perlindungan rakyat.

“....The electricity system often fails. Therefore, it is necessary to use a generator transformer, especially since there is a lack of vehicles to visit students and their parents in the villages. Because several villages are in remote areas. In addition, the condition of the school buildings is currently in a dilapidated condition. All of these problems will be submitted to the Police Commission. The House of Representatives is taking this into consideration and coordinating with the relevant agencies to find a solution.”

Dalam konteks ini, langkah-langkah yang diambil oleh Chitpas menunjukkan komitmen untuk mencari solusi yang efektif. Dalam upayanya untuk mengatasi masalah desa yang tertinggal dan sekolah yang kurang fasilitas, Chitpas menyadari bahwa diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Dengan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, diharapkan masalah-masalah tersebut dapat diatasi secara lebih holistik dan berkelanjutan.

Pada aspek *freedom*, diartikan sebagai kebebasan dalam berbicara, kebebasan memberikan dan mendapat penilaian, kebebasan untuk memahami dan dipahami, serta kebebasan untuk memilih tindakan yang bermakna. Pada indikator *freedom* diatas anggota parlemen Thailand berusaha memahami kebutuhan masyarakat, salah satunya terkait kualitas hidup masyarakat. Dalam wawancara Chitpas mengatakan:

“...banyak aspek kebutuhan dari masyarakat dan permintaan yang tidak tersampaikan oleh masyarakat, inilah penting nya peran sebagai anggota parlemen dalam melihat dan mengevaluasi. Saya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama kelompok rentan akan masuk dalam agenda nasional.”

Terdapat aspek kebutuhan dan permintaan yang dapat peneliti identifikasi, pertama, terkait kelompok masyarakat rentan yang disebutkan, seperti penyandang disabilitas, anak-anak, remaja, lansia, tunawisma, dan mantan narapidana, membutuhkan perhatian dan perawatan khusus untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Mereka membutuhkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan dukungan sosial. Kedua, masyarakat rentan ini menghadapi kesenjangan sosial yang semakin memburuk. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengurangi kesenjangan tersebut dan memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang setara dalam memperbaiki kualitas hidup mereka. Ini dapat melibatkan upaya untuk menciptakan akses yang adil terhadap sumber daya, kesempatan pekerjaan, pendidikan, dan layanan sosial.

CONCLUSION

Penelitian ini menyoroti peran penting pemimpin perempuan dalam politik, khususnya dalam konteks parlemen Thailand, dalam memperkuat representasi dan keberagaman dalam pengambilan keputusan publik. Pemimpin perempuan seperti Chitpas Kridakorn menunjukkan kemampuan untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi publik melalui pola komunikasi yang menekankan keterbukaan, transparansi, empati, dan kolaborasi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap isu-isu sosial dan kebutuhan masyarakat, serta pentingnya mengakomodasi perasaan dan aspirasi publik dalam pengembangan kebijakan. Melalui pendekatan retorika persuasif yang menggabungkan ethos, pathos, dan logos, Chitpas mampu mempengaruhi dan meyakinkan para pembuat kebijakan lainnya, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan. Dalam upayanya untuk memajukan pendidikan dan mengatasi kesenjangan sosial, Chitpas juga menunjukkan pentingnya kerja sama lintas sektor dan pendekatan yang berbasis data dalam pembuatan kebijakan.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak hanya berperan dalam memperkaya perspektif dalam politik, tetapi juga dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Temuan ini juga menegaskan bahwa gaya komunikasi dan empati yang dimiliki oleh pemimpin perempuan dapat menjadi model dalam mendukung pemajuan kebudayaan nasional, dengan memfokuskan pada pengembangan kualitas hidup dan pemberdayaan komunitas-komunitas yang rentan.

REFERENCES

- Bennett, W. L. (2018). A new era of minimal effects? The changing foundations of political communication. *Journal of Communication*, 58(4), 707–731.
- Chitpas. (2024, January 13). *Instagram*. Retrieved January 31, 2024, from <https://www.instagram.com/p/C2BguB8pMxl/>
- Dagron, A. G., & Tufte, T. (2014). *Communication for Social Change Anthology: Historical and Contemporary Readings*. CFSC Consortium.
- Hülsheger, U. R. (2014). Benefits of Mindfulness at Work: The Role of Mindfulness in Emotion Regulation, Emotional Exhaustion, and Job Satisfaction. *Journal of Applied Psychology* 98 (2): <https://doi.org/10.1037/a0031313>., 310-325.

- Inter-Parliamentary Union. (2023, May). *Parliaments Thailand*. Retrieved August 1, 2024, from <https://www.ipu.org/parliament/TH>
- Jamieson, K. H. (2017). *Echo chamber: Rush Limbaugh and the conservative media establishment*. Oxford University Press.
- Lemoine, G. J., Aggarwal, I., & Steed, L. B. (2016). When Women Emerge as Leaders: Effects of Extraversion and Gender Composition in Groups. *The Leadership Quarterly* 27 (3): <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.12.008>, 470-486.
- Matthes, J. &. (2018). *Content analysis: A methodological primer for political communication research*. In K. Kenski & K. H. Jamieson (Eds.). *The Oxford Handbook of Political Communication*: Oxford University Press, 53-72.
- McCombs, M. &. (2014). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176-187.
- Melkote, S. R., & Steeves, H. L. (2015). *Communication for Development: Theory and Practice for Empowerment and Social Justice*. SAGE Publications.
- Melkote, S. R., & Steeves, H. L. (2018). *Empowerment and Social Justice through Communication for Development*. Routledge.
- Mikke Setiawati, & Makkuraga Putra, A. . (2021). Pola Komunikasi Komunitas di Media Sosial Dalam Menciptakan Minat Entrepreneur: Studi fenomenologi followers xbank pada instagram. *Communications*, 3(1), 43–57. <https://doi.org/10.21009/Communications.4.1.3>
- Munir, M., & Ayu Pamukir, D. . (2021). Pola Komunikasi Feminisme Dalam Video Najwa Shihab dan Agnes Monica. *Communications*, 3(1), 87–107. <https://doi.org/10.21009/Communications.4.1.5>
- O’Neil, Tam, Plank, G., & Domingo, P. (2015). Literature review: Support to women and girls’ leadership: A rapid review of the evidence. *Overseas Development Institute (ODI)*.
- Servaes, J., & Melkote, S. R. (2015). *Participatory Communication for Social Change*. SAGE Publications.
- Sinpeng, A. (2022). “*Women’s Political Leadership in the ASEAN region: Research Report*.”. University of Sydney and Universitas Gadjah Mada .
- Strömbäck, J. &. (2014). *Mediatization of politics: Understanding the transformation of Western democracies*. Palgrave Macmillan.
- Stromer-Galley, J. (2014). *New technologies, new questions: Using the internet for political research*. In L. L. Kaid (Ed.), *Handbook of political communication research*. pp. 129–151: Routledge.
- Subramanian, R. B. (2016). Women leadership in organization. . *Indore Management Journal*, 8(2), 15-26.

- Suriyasarn, B. (2017). Communicative dynamics in Thailand's 2016 referendum on the constitution: Implications for democratic deliberation. *Journal of Asian Pacific Communication*, 27(2), 166–188.
- UN Women. (2018, November 6). *Women's Leadership and Political Participation*. Retrieved August 2, 2024, from <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/thailand/promoting-womens-leadership-and-participation-in-decision-making>
- UN Women. (2022). *Women's Leadership in the ASEAN Region: Data Snapshot*. asiapacific.unwomen.org.
- Kulachai, Waiphot S. C. (2024). Political communication and political success: The art of effective messaging. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 681-694.
- World Economic Forum. (2017). *Global Gender Gap Report*. Switzerland: [weforum.org](https://www.weforum.org).

